

# NEWSLETTER

LP3Y  
Ferd Foundation

**B**encana memang tidak mengenal waktu. Baru saja negeri ini dilanda banjir di Wasior, Papua, tidak lama berselang, bertubi-tubi bencana datang. Sebut saja Tsunami di kepulauan Mentawai, Sumatera Barat dan letusan Gunung Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Banyak kerugian yang ditimbulkan akibat bencana ini, baik fisik ataupun psikologis. Mengingat kerapnya terjadi peristiwa bencana, ada hal yang perlu dipertanyakan, sejauh mana telah dilakukan untuk mengantisipasi spasial kemungkinan kerugian besar akibat bencana tersebut? Bencana memang tidak dapat dihindari, namun meminimalisir dampak dapat dilakukan, sebagai upaya pencegahan terhadap bencana tersebut.

Dalam hal ini, dapat dikatakan pemerintah memang belum terlihat melakukan tindakan proaktif menanggapi bencana yang terjadi.

Artinya, belum ada tindakan yang dilakukan jauh-jauh hari untuk mengantisipasi bila bencana terjadi. Pemerintah selama ini cenderung bersikap reaktif, baru bergerak ketika jatuh korban. Belum lagi lambannya penanganan dalam merespon bencana ini. Terlalu banyak prosedur, berbelit dan tidak cepat sehingga bantuan sangat lambat diterima. Seperti yang dikatakan Yusuf Kalla bahwa tidak perlu menunggu administrasi jika ada bencana, sepanjang itu tidak melanggar aturan. Ini yang selalu ditekankan oleh Kalla baik kepada pemerintah pusat maupun provinsi agar tidak takut menurunkan bantuan bila ada bencana yang terjadi (*Kompas.com, 27/11/10*)

Dalam peristiwa bencana letusan Gunung Merapi,

sejak meletus pada 26 Oktober 2010, warga yang tinggal di radius 15 kilometer dari Merapi sudah diharuskan mengungsi. Keputusan yang disampaikan oleh Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Surono saat itu, tentu menimbulkan kepanikan warga. Sejak saat itu mereka pun harus menunggu di tempat pengungsian dengan penuh ketidakpastian kabar kapan aktivitas Merapi mereda atau aman, sehingga mereka bisa pulang. Selama itu pula, banyak diantara mereka yang tidak betah di tempat pengungsian yang jelas sangat tidak nyaman itu.

Sesungguhnya banyak yang dapat dipetik dari pengalaman-pengalaman penanganan bencana. Mengingat ancaman bencana alam selalu mengintai Indonesia, akan lebih baik jika pemerintah bersama pihak terkait, melakukan tanggap bencana alam, dengan menyusun rencana strategis yang efektif penanggulangan bencana alam dan dampaknya.

Tak terkecuali pers. Saat ini pers diharapkan

memberikan ruang yang cukup terhadap isu kebencanaan dalam pemberitaannya. Hal ini sangat dibutuhkan masyarakat, paling tidak untuk mengingatkan apa yang harus dilakukan jika bencana terjadi. Juga untuk membantu masyarakat memahami tanda-tanda alam yang sewaktu-waktu berubah sebagai pertanda bencana datang atau tentang hal lainnya sebagai pembelajaran dalam menghadapi bencana.

Di sisi lain, pers dapat pula berperan memberi input kepada pihak yang berhubungan dengan persoalan ini, terutama pemerintah. Sehingga apa yang disampaikan oleh pers dapat menjadi pertimbangan, guna perbaikan kinerja dalam penanggulangan bencana alam. (may)

Foto: Dedi/IP3Y



Saat hujan abu di jalan Bantul, pasca letusan gunung Merapi 26/10/10

ISSN 0853-7402



Cara mendapatkan NEWSLETTER PMP AIDS: Kirimkan identitas serta nama media Anda, akan kami kirimkan secara gratis. Informasi yang kami muat di NEWSLETTER dapat dikutip atau disiarkan tanpa ijin asal menyebut sumber. Apabila anda memiliki informasi tentang HIV/AIDS yang layak untuk disebarkan kepada masyarakat luas, silakan kirim dan akan kami muat. Anda dapat menghubungi kami ke alamat: LP3Y Jl.Kaliurang Km 13,7 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta 55584 atau via telepon dan faksimili No. (0274)896016, email: lp3y@idola.net.id dan situs <http://www.lp3y.org>

Penanggung Jawab : Ashadi Siregar Pimpro/Pemimpin Redaksi : Slamet Riyadi Sabrawi Staf Redaksi : Agoes Widhartono, Dedi H Purwadi, Ismay Prihasuti, Rondang Pasaribu Sekretaris Redaksi : W. Nurcahyo



# Masuk Angin: Konsep Jawa Vs Modern

Dari seminar Masuk Angin di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM

**S**eminar bertemakan “Masuk Angin: Konsep Jawa vs Modern dan Implikasinya” yang dibawakan oleh Dra. Atik Triratnawati, M.A. ini menarik perhatian audience. Terlihat para peserta seminar yang hadir pada Kamis, 28 Oktober 2010 itu cukup banyak, tidak seperti biasanya yang terkadang hanya seperempat ruangan. Kali ini hampir separuh lebih peserta seminar memenuhi ruang auditorium lantai 2 Gedung Masri Singarimbun.

Dosen Antropologi UGM dan juga peneliti CEBU Fakultas Kedokteran UGM ini mengungkapkan hasil penelitiannya yang dilakukan pada 2008-2009 lalu. Lokasi penelitian yang dilakukan di dua daerah yakni Desa Sardonoarjo, Sleman Yogyakarta dan Desa Pandangan Wetan, Rembang, Jawa Tengah.

Mengapa masuk angin menjadi perhatian para peserta seminar? Hal ini disebabkan karena masuk angin sangat akrab di telinga masyarakat Jawa. Seperti yang diungkapkan Atik, konsep masuk angin bagi orang Jawa telah dianggap sebagai gangguan kesehatan yang sifatnya biasa atau lumrah, bahkan akibat masuk angin itu sering mereka alami sehingga disebut penyakit harian.

Berikut ini adalah hasil catatan yang diikuti oleh redaksi *Newsletter* yang hadir pada seminar tersebut :

Masuk angin adalah fenomena budaya sekaligus medis. Oleh karena masuk angin adalah pemahaman konsep Jawa terkait dengan ketidaknyamanan tubuh tetapi hal itu juga merupakan konsep medis sebab memang tubuh mengalami gangguan dan mereka juga memiliki cara mengenali penyebab, penyembuhan, maupun pencegahannya.

Pemahaman Jawa mengenai masuk angin selalu terkait dengan angin yang masuk ke dalam tubuh sehingga seluruh tubuh menjadi dingin. Penyebab masuk angin dapat bersifat fisik maupun mental, atau bahkan keduanya. Pada informan yang ditemukan beberapa pengalaman masuk angin disebabkan oleh faktor banyaknya pikiran, perasaan atau emosi sering menjadi pencetus munculnya masuk angin.

Gejala masuk angin antara orang satu dengan lainnya berbeda. Bahkan intensitas gejalanya juga berbeda.

Ada penderita yang merasa bagian kepala dirasa paling berat rasanya, umumnya kepala terasa pusing, berdenyut-denyut bahkan berputar-putar, sementara yang lain merasa bahwa bagian perutlah yang dirasa paling berat sebab bagian perut terasa mual, kembung dan tidak jarang kemudian muntah-muntah.

Ada pula seseorang mengenali masuk angin dari badan yang terasa pegal linu, *keju-keju* (terasa pegal sekali), bahkan otot-otot di seluruh badan hampir copot. Dan tidak sedikit penderita masuk angin merasakan bahwa mata terasa ngantuk terus menerus, rasanya badan hanya ingin tidur saja, meski mereka baru saja bangun dari tidur.

Orang Jawa membedakan masuk angin berdasarkan berat ringannya gejala, banyak sedikitnya jumlah gejala, serta mudah tidaknya dalam proses penyembuhan.

Pertama, masuk angin ringan yaitu masuk angin yang dirasakan gejalanya tidak terlalu berat, tidak sampai muntah maupun diare, masih mampu bekerja atau beraktivitas serta masih mau makan dan minum meski jumlahnya tidak seperti saat sehat.

Kedua, masuk angin berat, yaitu masuk angin dengan gejala yang beragam dan berat termasuk diikuti muntah-muntah maupun diare. Ketiga, masuk angin kasep, masuk angin yang dibiarkan atau tidak dirasakan penderitanya sehingga berubah menjadi berat bahkan membawa kematian yang sifatnya mendadak. Masuk angin kasep ini selalu diawali dengan masuk angin biasa, kemudian masuk angin berat, akan tetapi oleh penderitanya hal itu tidak dirasakan serta tidak segera ditanggulangi. Akibatnya kematian mendadak yang sering diawali dengan rasa tidak enak badan, sesak napas atau keluar banyak keringat itu disebut sebagai angin duduk.

Bagi orang Jawa masuk angin duduk sebagai masuk angin yang berbahaya sebab penderita umumnya tidak mampu ditolong lagi. Oleh sebab itu, gangguan masuk angin tidak boleh dianggap sepele atau ringan, karena jika tidak dirawat atau dibiarkan saja tidak diperhatikan, akibatnya akan fatal yaitu kematian. Pihak medis



## DAPUR INFO

menyebut angin duduk sebagai gangguan pembuluh darah yang jika dibiarkan akan menjadi serangan jantung.

### Pengobatan masuk angin

Orang Jawa mengatasi gangguan masuk angin dengan cara kerokan. Kerokan adalah menggosok atau mengerik (tidak sampai mengelupas) bagian kulit tubuh penderita dengan tekanan yang lembut dan dibantu alat berupa uang logam (*benggal*) serta minyak atau balsam sebagai pelicin.

Jika kerokan atau minum jamu dan obat bebas tidak mengatasi sakit masuk angin, atau tidak sembuh selama 3 sampai 7 hari maka banyak penderita kemudian berobat kepada dokter. Padahal dalam istilah medis, masuk angin tidak dikenal. Masuk angin dalam kacamata medis kedokteran tidaklah dianggap sebagai penyakit melainkan hanya kumpulan gejala saja seperti flu/pilek.

Dalam praktik medis para dokter menyebut masuk angin dianggap manifestasi dari gejala penyakit seperti flu, batuk, ISPA (infeksi saluran pernapasan atas), maag,

gangguan pencernaan, penyakit jantung atau gangguan penglihatan bagi mereka yang sudah berusia lanjut.

Namun karena banyak pasien, khususnya orang Jawa melakukan kerokan dan terbukti sembuh, maka faktor sugesti dianggap sebagai faktor utama kesembuhan tersebut. Para dokter masih menghormati kepercayaan tradisional dari pasien terhadap penyembuhan rumah tangga yang mereka lakukan. Dokter kemudian akan mengobati pasien dengan cara meringankan gejala yang dialami pasien.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa masuk angin muncul sebagai proses ketidakseimbangan baik yang menyangkut fisik, mental maupun sukma sehingga proses penyembuhan yang bersifat holistik pun dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan. Sementara pihak medis menganggap masuk angin hanyalah kumpulan gejala seperti flu atau penyakit lainnya sehingga penyembuhannya cenderung menekan pada aspek klinis yang mandiri dan terpisah dari unsur budaya. (may)

# Penutupan Pelatihan Koran Warga

Minggu pagi, 31 Oktober 2010 di pendopo Dusun Warungpring, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul terlihat agak ramai. Pertemuan yang dihadiri para peserta pengelola koran warga dan juga dua peserta dari radio komunitas Sadewo adalah acara penutupan dan sekaligus pembukaan.

Foto: Dedi/IP3Y



Slamet Riaydi memberikan sertifikat kepada Umi Narsih peserta pelatihan Koran Warga

Penutupan yang dimaksud adalah penutupan untuk pelatihan pengelola koran warga yang telah dimulai sejak Juli lalu. Sedangkan pembukaan adalah awal atau mulai terbentuknya kepengurusan koran warga yang diharapkan November akan terbit sebagai edisi perdana.

Koran warga yang menjadi tujuan program warga bermedia dikelola oleh peserta yang berasal dari lima desa dalam Program Pelembagaan Partisipasi dan Kebebasan Informasi Publik untuk Menjamin Akses Kelompok Marginal dan Kelompok Perempuan atas Sumber Daya Ekonomi dan Kebijakan Publik, yang

bertujuan menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat di lima desa tersebut.

Acara yang berlangsung sejak pukul 09.30 hingga siang sekitar pukul 13.00 terdiri atas evaluasi pelatihan koran warga, pemberian sertifikat bagi peserta dan kenang-kenangan bagi peserta terbaik.

*Bersambung ke Hal 9*



# Berita Media dan Penyebab Banjir Bandang Wasior

**B**anjir bandang menerjang Wasior, ibu kota Teluk Wondama, Papua Barat, Senin 4 Oktober 2010, tak lama setelah hujan deras mengguyur. Kota itu, dengan segala infrastrukturnya nyaris tinggal nama: semua porak poranda. Lebih dari 150 warga tewas.

Pertanyaan penting, di luar aspek penanganan para korban dan pengungsi serta pembangunan kembali kehidupan kota tersebut, adalah apa penyebab banjir bandang itu?

Mengapa hal itu menjadi penting diketahui, tak lain untuk melihat apakah bencana ini timbul akibat ulah manusia, atautkah semata murni fenomena alam yang dampaknya sama sekali di luar perkiraan?

Jawaban tepat atas pertanyaan itu penting bukan sekadar untuk sebuah pengetahuan. Jawaban ini penting untuk pertimbangan, terutama untuk mencegah agar peristiwa bencana serupa tak berulang di tempat yang sama maupun di tempat lain dengan kondisi serupa.

Media diharapkan memberikan jawaban itu. Namun, bagaimana sesungguhnya media menjawab keingintahuan tersebut?

Hasil pengamatan terhadap dua media cetak dengan sirkulasi nasional, *Kompas* dan *Koran Tempo* edisi 5 – 16 Oktober 2010 menunjukkan bahwa jawaban yang “disuguhkan” tidak membantu publik atau pembaca mendapat informasi yang utuh. Alih-alih

menjawab pertanyaan, berita-berita di kedua media cetak tersebut justru menjauh dari jawaban yang diharapkan.

## **Kompas: Melulu Bantahan**

Dari total 10 *item* berita bencana banjir bandang Wasior yang dimuat *Kompas* informasi tentang penyebab banjir tertuang dalam 13 alinea. Adapun jumlah alinea ke-10 *item* berita tersebut sebanyak 164.

Informasi yang tertuang dalam 13 alinea seluruhnya berupa bantahan atas informasi yang menyebutkan banjir bandang di Wasior akibat rusaknya hutan Wondiboi (hutan di atas Wasior)

karena HPH (hak pengelolaan hutan) dan pembalakan liar (*illegal logging*). Adapun bantahan tersebut semuanya bersumber dari pihak yang sama, yaitu pemerintah, hanya sosok aktornya yang berbeda.

Pihak pemerintah yang dikutip *Kompas* yaitu Presiden, Menteri Kehutanan, Bupati Teluk Wondama, Kepala Bidang Wasior Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Kepala Bidang Pengamatan Gempa Bumi dan Gerakan Tanah PVMBG dan Deputi Bidang Klimatologi Badan Meteorologi. Satu sumber di luar pemerintah yaitu ahli geologi, dengan informasi sebanyak satu alinea. Ahli geologi ini pun hanya memberikan keterangan berupa asumsi, sebab selain diwawancarai di Yogya yang bersangkutan pun belum



Pemandangan di sudut kota wasior pasca banjir bandang

Sumber: <http://www.ingateros.com/>



melihat kondisi lapangan.

Pemerintah, melalui pejabat-pejabat tersebut senada menyatakan dan saling menguatkan bahwa penyebab bencana Wasior bukan kerusakan hutan akibat HPH ataupun pembalakan liar. Cuaca ekstremlah yang menimbulkan hujan lebat sebagai pemicu. Volume air yang amat tinggi tak mampu ditampung oleh danau-danau di hutan Wondiboi. Dinding danau pun jebol dan air bersama bebatuan, lumpur serta pepohonan menggelontor menerjang Wasior.

Pemuatan bantahan ini penting pula untuk dicermati, sebab sejak berita bencana banjir bandang Wasior dipublikasikan *Kompas* (5/10) hingga berita bantahan pertama kali dimuat pada hari ke-6 (10/10) tak satu kalimat pun *Kompas* memuat keterangan pihak manapun yang menyatakan penyebab bencana Wasior adalah kerusakan hutan. Tiba-tiba pembaca disuguhi berita berisi bantahan tentang sesuatu yang belum dimunculkan oleh *Kompas*.

Kata bantahan, muncul pertama kali pada *Kompas* edisi 10 Oktober di alinea 16 dengan sumber berita Bupati Teluk Wondama: Terkait banjir yang disertai longsor bebatuan dan kayu berukuran besar di Wasior, Bupati Teluk Wondama Alberth Torey membantah adanya pembalakan liar di cagar Alam Wondiboi.

Selanjutnya, kata bantahan atau yang senada dipergunakan di alinea-alinea lain, misalnya ...Menteri Kehutanan menolak tudingan bahwa bencana alam di Kabupaten teluk Wondama, berkaitan dengan pembalakan liar (edisi 12/10, alinea 13); Secara khusus Presiden menyatakan bantahannya bahwa telah terjadi aksi pembalakan liar yang menyebabkan bencana banjir bandang di Wasior (edisi 15/10, alinea 7).

Bagi pembaca yang mencermati khusus berita bencana Wasior rangkaian berita *Kompas* ini tentu menimbulkan pertanyaan. Mengapa tiba-tiba memunculkan bantahan dan mengapa terus-menerus bantahan pemerintah yang dipublikasikan?

Namun yang lebih substansial adalah apa benar bencana Wasior bukan karena kerusakan hutan, sebagaimana berulang-ulang dibantah pihak pemerintah dan berulang kali diberitakan *Kompas*? Pembaca *Kompas* tidak punya pilihan untuk menilai realitas. Pembaca hanya disuguhi keterangan satu pihak, yaitu pemerintah. Di sini kebenaran menjadi milik kekuasaan dan *Kompas* secara tak langsung membantu hegemoni itu.

### ***Koran Tempo*: Pembaca Harus Memilih**

Jika *Kompas* melulu memberitakan bantahan dari satu pihak yaitu pemerintah, *Koran Tempo* memberitakan

## **ANALISIS INFO**

kontroversi tentang penyebab banjir bandang Wasior. Selain memuat bantahan sekaligus versi pemerintah, *Koran Tempo* memberitakan penyebab bencana versi LSM (Lembaga Swada Masyarakat), bahwa banjir bandang disebabkan rusaknya hutan Wondiboi oleh kegiatan HPH dan pembalakan liar.

Ada sembilan berita tentang bencana Wasior dimuat surat kabar ini dengan jumlah alinea 87. Dari 87 alinea, 17 alinea berkaitan dengan penyebab bencana. Adapun sumber berita terkait penyebab bencana beragam, yaitu pemerintah (dimuat dalam 8 alinea), LSM (diberi ruang 7 alinea) dan warga Wasior (2 alinea).

Pihak pemerintah yang dikutip yaitu Menko Kesra, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Teluk Wondama dan Koordinator Penanggulangan Banjir Wasior. Adapun pihak LSM yaitu Koordinator Jaringan Advokasi Sosial dan Lingkungan (Jasoil) Tanah Papua, Forum Kerja LSM Papua dan Direktur Eksekutif Walhi.

Berbeda dengan *Kompas* yang tidak mengangkat langsung penyebab bencana sebagai topik utama baik melalui judul maupun *lead* pada seluruh berita, *Koran Tempo* menjadikan penyebab bencana sebagai topik utama dua beritanya. Pertama, pada edisi 6 Oktober *Koran Tempo* menurunkan berita berjudul Penebangan Hutan Undang Banjir di Wasior (hal A8) dan pada edisi 12 Oktober dengan judul Pemerintah Tegaskan Bencana Wasior Karena Cuaca Ekstrem (hal A7).

Lebih cepat dari *Kompas* yang memuat informasi tentang penyebab bencana baru di hari ke-6, *Koran Tempo* sudah memuatnya di hari kedua pemberitaan (edisi 6/10) yaitu langsung mengangkat topik penyebab bencana sebagai *headline* halaman A8/Nusa (Penebangan Hutan Undang Banjir di Wasior). Sumber utama berita yaitu Koordinator Jaringan Advokasi Sosial dan Lingkungan (Jasoil) Tanah Papua, Pitsaw Amafrini.

Tiga alinea awal (mulai *lead*) dari total sembilan alinea berita tersebut langsung menunjuk kerusakan hutan sebagai penyebab banjir bandang Wasior. *Lead Koran Tempo* ditulis demikian: Penebangan hutan yang dilakukan 10 tahun terakhir dituding sebagai penyebab banjir bandang di Wasior, Senin pagi lalu. Akibatnya ....

Penjelasan narasi pada *lead* disampaikan pada alinea ke-2 dan ke-3: Pitsaw Amafrini, Koordinator Jaringan Advokasi Sosial dan Lingkungan (Jasoil) Tanah Papua, mengungkapkan, ada ratusan hektar hutan yang lenyap atau berubah rupa karena dibabat sepanjang periode itu. Dua perusahaan, PT Wapoga Mutiara Timber dan PT Dharma Mukti Persada, tercatat sebagai pemegang HPH di wilayah yang dimaksudkan. "Perusakan hutan yang mengakibatkan banjir kali ini," kata Pitsaw kemarin

*Bersambung ke hal 9*



# Di balik Kekerasan Warga

**I**nfografis yang disajikan Harian *Kompas* (1 Oktober 2010) pada halaman pertama, boleh dibilang berhasil menyampaikan pesan betapa mengerikan kekerasan warga yang terjadi di negeri ini. Dengan latar belakang warna merah darah, dihiasi gambar sebilah golok, infografis tersebut ditempatkan sebagai *banner*, sehingga mencolok mata.

Rasa ngeri akan semakin kuat setelah mencermati lebih jauh data yang disertakan dalam infografis itu. Ada tujuh peristiwa kekerasan warga yang terjadi selama kurun waktu April September 2010. Setiap peristiwa menimbulkan korban manusia, baik yang tewas maupun yang terluka. Selain itu, rumah dibakar atau dirusak, begitu pula kendaraan.

Segera muncul pertanyaan: Mengapa warga begitu mudah melakukan kekerasan? Pertanyaan inilah yang dijawab berita utama harian dimaksud, ditempatkan persis di bawah infografis itu, bertajuk **Rakyat Alami Frustrasi Sosial**.

Dikemukakan, kenyataan maraknya kekerasan warga merupakan bukti bahwa rakyat tengah mengalami frustrasi sosial. Ada berbagai faktor saling memengaruhi yang menjadi penyebab kondisi tersebut, seperti lemahnya penegakan hukum, ketiadaan keteladanan dari elite politik, dan kemiskinan.

Penjelasan itu bisa dibenarkan. Ambil satu contoh, yaitu lemahnya penegakan hukum. Sudah menjadi rahasia umum selama ini penegakan hukum sangat lemah. Artinya hukum bisa dipelintir sesuai keinginan pihak yang kuat. Berbagai kasus suap yang melibatkan aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, dan hakim, merupakan bukti mengenai kenyataan ini.

Maka bisa dimengerti, manakala terjadi perselisihan antar pihak, jalur hukum bukan lagi merupakan jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan. Kenyataan bahwa penegakan hukum lemah menyebabkan pihak yang berselisih sampai pada kesimpulan menempuh jalur hukum hanya buang-buang waktu, karena aparat penegak hukum tak lagi dapat dipercaya. Dengan demikian pihak yang berseteru lebih suka memilih jalan yang dianggap mampu menguntungkan atau melindungi kepentingan masing-masing, salah satunya adalah kekerasan.

Akan tetapi, dengan semakin maraknya kekerasan

warga, sementara penegakan hukum lemah adanya, isyarat yang segera dapat ditangkap adalah bahwa tidak ada lagi rasa aman dalam kehidupan bersama di ruang publik. Dari sini bisa dimunculkan pertanyaan: Seperti apa pemahaman dan sikap warga bangsa ini mengenai kehidupan bersama di ruang publik? Sekalipun penegakan hukum lemah, tidak ada lagikah nilai-nilai (norma yang bersifat kultural) yang menjadi acuan bersama dalam kehidupan bersama di ruang publik?

Pertanyaan itu menjadi penting, mengingat bangsa ini suka menyebut diri sebagai bangsa yang berbudaya, sopan, ramah, mau bergotong royong, dan sebagainya. Jika betul demikian, semestinya bangsa ini memiliki nilai-nilai moral sebagai acuan saat bersama orang lain dalam kehidupan bersama. Lantas, ketika nilai-nilai itu ditinggalkan, diganti dengan kekerasan, apa yang sesungguhnya terjadi?

## Kohesi sosial meredup

Industrialisasi, perekonomian global, dan juga teknologi, tidak hanya membawa modernisasi, tapi sekaligus mengikis nilai-nilai yang selama ini dimiliki. Ambil contoh semangat kerjasama, atau yang dikenal dengan sebutan gotong royong.

Semangat bekerja sama demi kemajuan bersama, kini semakin ditinggalkan. Orang atau kelompok bekerja semakin otonom. Segala sesuatu dikerjakan atas nama keahlian atau profesionalisme. Sedang keahlian atau profesionalisme itu harus diberi imbalan sepadan.

Karena semakin otonom, orang tidak lagi memerlukan keberadaan yang lain, tidak merasa perlu berjumpa dengan yang lain. Semangat kerjasama semakin menipis, atau dengan kata lain kohesi sosial meredup.

Kondisi ini sekaligus menimbulkan kekhawatiran dalam diri pribadi maupun kelompok atas keberadaan yang lain. Keberadaan yang lain dilihat sebagai ancaman, sebab yang lain itu ? karena mungkin mempunyai keahlian atau profesionalisme yang sama atau bahkan lebih ? bisa saja mengambil alih pekerjaannya yang dimiliki sekarang. Kecurigaan menguat, sebaliknya sikap saling percaya semakin lemah.

## Ketidaksetaraan melebar



Budaya gotong royong yang digantikan budaya otonom membuka lebar persaingan bebas (*free fighting*). Ini berarti masing-masing pribadi atau kelompok akan berjuang demi kepentingan masing-masing. Kesempatan bekerja sama dengan yang lain demi kemajuan bersama tidak lagi terpikirkan.

Bagi yang mempunyai posisi setara, tentu tidak ada yang keberatan ikut serta dalam persaingan. Kenyataan membuktikan itu yang terjadi bukan seperti itu.

Bangsa yang terdiri atas suku yang sangat beragam ini senyatanya menghadapi ketidaksetimbangan baik dalam hal kepemilikan modal maupun sumberdaya lain? termasuk teknologi. Artinya, ketidakseimbangan menyebabkan perjumpaan dengan yang lain dalam kehidupan bersama tidak mungkin lagi setara.

Persaingan yang dibuka selebar dan seluas-luasnya akan membuat ketidaksetaraan semakin melebar. Ketidaksetaraan jika tidak disikapi secara rasional mudah menyulut kecemburuan. Kecemburuan pada gilirannya gampang memicu prasangka. Orang penuh prasangka tidak lagi memandang perjumpaan dengan orang lain? apalagi orang lain itu memiliki kelebihan? dalam kehidupan bersama di ruang publik sebagai kesempatan yang bermanfaat bagi pertumbuhan dirinya. Perjumpaan dengan orang lain akan dianggap mengurangi kebebasan, mengurangi peluang.

### Ruang menyempit

Berdasarkan sensus terakhir (2010) jumlah penduduk negeri ini mencapai 238 juta. Telah lama dipahami bahwa jumlah penduduk sedemikian besar akan menimbulkan persoalan apabila tidak dikelola secara baik.

Bagaimana memaknai keberadaan jumlah penduduk yang besar itu dalam konteks kehidupan bersama di ruang publik?

Kehadiran yang lain, apalagi dengan jumlah yang semakin banyak, menyebabkan ruang, sumber daya, dan waktu, semakin terbatas karena harus dibagi bersama. Jadi, mempersempit ruang gerak. Ini menimbulkan ketidakpastian. (Al. Andang L. Binawan, *Kesucian Hukum di Ruang Publik*, dalam *Ruang Publik*, Kanisius 2010).

Menyempitnya ruang gerak menandai berkurangnya kemampuan membangun identitas pribadi maupun kelompok. Ini sekaligus menyebabkan semakin sempit pula kesempatan menyuarakan kepentingan, karena dengan jumlah penduduk yang sedemikian banyak yang terdengar hanyalah suara kerumunan.

Ruang gerak juga semakin sempit ketika ekonomi global membongkar semua benteng perlindungan kalau benteng itu pernah ada memungkinkan pemilik modal berinvestasi di bidang mana serta di pelosok mana pun di negeri ini. Mengingat kehadiran mereka berperan dalam pertumbuhan ekonomi (devisa, pendapatan per kapita, pajak, lapangan pekerjaan, dll.), ada kemungkinan suara mereka lebih didengar sehingga mereka betah di sini. Dengan kata lain, ruang publik menyempit.

### Dari tawuran siswa ke kekerasan warga

Banyak pengamat menyalahkan mengapa pendidikan budi pekerti tersingkir dari kurikulum sekolah. Keprihatinan tersebut mengemuka menyusul maraknya kekerasan (tawuran) antar siswa beda sekolah atau perkelahian antar mahasiswa beda fakultas.

Mengingat perkelahian justru terjadi di kalangan muda seperti mereka, ada kekhawatiran tanpa dibekali pendidikan budi pekerti, kecenderungan menggunakan kekerasan akan terbawa-bawa apabila mereka itu terjun ke tengah masyarakat kelak. Sebab selepas menempuh pendidikan, mereka itulah kemudian menjadi warga yang menjalankan kehidupan bersama di ruang publik.

Jika bekal budi pekerti yang dimaksudkan cuma sebatas pembelajaran agar mampu menahan emosi, sopan dan ramah terhadap yang lain, tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi perselisihan, tidak ada jaminan bahwa begitu menjadi warga, mereka tidak anarkis. Dalam hal ini pertanyaan berikut menjadi relevan: Sejauh mana peran pendidikan yang diharapkan bisa membentuk masyarakat yang tidak anarkis? (Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslimat*, Kanisius 2010).

Dalam kehidupan bersama di ruang publik, apakah mereka sebagai warga akan bertindak anarkis atau tidak antara lain tergantung pada sejauh mana mereka memiliki nilai-nilai yang dijadikan acuan bagi siapa pun berdasarkan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama hanya bisa dicapai apabila ada kesediaan mengakui dan menghargai keberadaan yang lain, dan karena itu demi kepentingan bersama ada keterbukaan untuk berdialog maupun bekerjasama dengan yang lain.

Persoalannya, yang lain itu tidak hanya sekadar warga yang kebetulan hadir bersama di ruang publik. Yang lain itu adalah penyebab ruang kehidupan bersama semakin sempit, menyebabkan sumberdaya yang bisa diperoleh menjadi lebih terbatas karena harus dibagi bersama. Jadi, yang lain itu selain pesaing juga menjadi ancaman.

Dalam konteks itulah adanya nilai-nilai sebagai acuan semua pihak berdasarkan kesepakatan bersama menjadi penting. Nilai-nilai semacam itu seyogyanya tidak cukup hanya bersumber dari sekolah, tetapi juga dari warisan budaya, dari keluarga, atau sumber lain. Nilai-nilai tersebut juga harus selalu dibicarakan bersama. Selain agar tidak serta merta terlupakan, juga supaya sekaligus diaktualkan sesuai perkembangan zaman. Sebab, ketika ruang publik menyempit karena orang tambah banyak, sementara sumber daya harus dibagi bersama, seharusnya nilai-nilai moral bersifat kultural bisa menjadi acuan agar kehidupan bersama di ruang publik tidak lantas dikendalikan oleh hukum rimba.

Apabila bangsa ini memang bangsa berbudaya, semestinya nilai-nilai dimaksud memang dimiliki. Kalau kemudian nilai-nilai itu ditinggalkan tanpa ada nilai pengganti yang sama atau bahkan lebih baik, maka kekerasan akan mudah merebak. Maka, bukan hanya pendidikan tanpa budi pekerti yang harus disalahkan. Pembangunan karakter bangsa agar sungguh menjadi bangsa yang berbudaya, agaknya terabaikan. (rondang pasariibu)



# Kegiatan IDEA

Pada Oktober ini *Institute of Development and Economic Analysis* (IDEA) menyelenggarakan beberapa kegiatan diantaranya lokakarya “Menggagas Inovasi Pemenuhan Hak Dasar Warga melalui perencanaan dan penganggaran daerah yang partisipatif dan transparan”.

Adapun tujuan dari lokakarya yang diselenggarakan pada Selasa, 5 Oktober 2010 ini adalah menggali gagasan inovasi dalam pemenuhan hak warga melalui perencanaan penganggaran yang partisipatif dan transparan di Kabupaten Bantul. Peserta lokakarya tingkat kabupaten Bantul ini terdiri dari anggota DPRD Bantul, Sekretariat Daerah Perwakilan Sekretariat Daerah, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten, PMD Kabupaten, Perwakilan Kelompok Masyarakat dan Pemerintah Desa Gilangharjo, Desa Bambanglipuro, Desa Wonolelo, Desa Srihardono, Desa Jambidan, Desa Terong dan LSM yang terlibat pada program kegiatan ini.

Acara yang berlangsung dari pagi hingga siang hari ini bertempat di Ruang Gamelan Lor Rumah Budaya Tembi Timbulharjo, Bantul, Yogyakarta.

## KEGIATAN

Setelah acara tersebut, dilanjutkan dengan Diskusi “Membangun Strategi Masyarakat Sipil Dalam Melakukan Advokasi Kebijakan Di Kabupaten Bantul”. Peserta Diskusi ini terdiri dari beberapa LSM yakni YP2SU, Daya Anissa, SPTNHPS, CRI, LP3Y, SP Kinasih, dan ASPPUK serta Perwakilan Kelompok Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Adapun tujuan diskusi ini merumuskan strategi masyarakat sipil dalam melakukan advokasi kebijakan di Kabupaten Bantul. Masih di tempat yang sama yakni di ruang Gamelan Lor Rumah Tembi Timbulharjo Bantul, acara ini pun berlangsung pada pukul 13.30 – 15.30 WIB. Berikut Jadwal Kejadiannya :

Tujuan dari kegiatan pelatihan ini adalah:

1. Peserta mengerti dan memahami tentang konsep penanggulangan bencana dan mampu melakukan analisis risiko bencana di wilayah masing-masing.
2. Peserta mampu menyusun rencana aksi penanggulangan bencana berdasarkan analisis risiko bencana masing-masing wilayah.
3. Peserta mengerti dan memahami sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Peserta mengerti dan memahami hak warga dan kewajiban negara serta proses perencanaan penganggaran.
5. Peserta mengerti dan memahami pentingnya proses integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsive Pengurangan Risiko Bencana ini diselenggarakan selama dua hari yakni Selasa, 19 Oktober 2010 – Rabu, 20 Oktober 2010. Waktu kegiatan pelatihan setiap harinya dimulai pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB. Acara inipun berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Mulyodadi. Adapun peserta pelatihan ini merupakan perwakilan kelompok masyarakat dari 9 Desa di Kabupaten Bantul, yaitu :

1. Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo (2 Orang)
2. Desa Wonolelo, Kecamatan Plered (4 Orang)
3. Desa Srihardono, Kecamatan Pundong (4 Orang)
4. Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong (2 orang)
5. Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak (4 Orang)
6. Desa Jambidan, Kecamatan Banguntapan (4 Orang)
7. Desa Jetis, Kecamatan Imogiri (2 Orang)
8. Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro (4 Orang)
9. Peserta umum (4 Orang)

( Sumber : Tim IDEA)

---

### Sambungan dari hal 3

Dalam sesi evaluasi yang dipandu oleh Dedi Purwadi selaku fasilitator sekaligus koordinator pelatihan koran warga ini didapati sejumlah catatan dari keberlangsungan pelatihan. Catatan tersebut antara lain kendala pelatihan. Kendala pelatihan pertama yakni jarak atau tempat pelatihan yang terlalu jauh bagi ukuran para peserta. Jauhnya jarak tempat pelatihan (kantor LP3Y) dengan tempat tinggal para peserta menyebabkan mereka tidak hadir dalam pelatihan.

Kedua, kendala waktu. Waktu pelatihan yang diselenggarakan pada hari-hari kerja menyebabkan mereka tidak dapat ikut karena para peserta pelatihan koran warga meliputi mahasiswa, guru, pengurus PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan ibu rumah tangga.

Sedangkan dari evaluasi tersebut didapati sejumlah kemanfaatan bagi para peserta antara lain; menambah

---

### Sambungan dari hal 5

(alinea 2).

Selanjutnya, *Koran Tempo* memuat secara berselang-seling (tentang penyebab banjir) antara keterangan pihak LSM yang menunjuk kerusakan hutan sebagai penyebab dengan bantahan pemerintah terhadap keterangan tersebut dan bersikukuh bahwa (1) hutan tidak rusak dan (2) cuaca ekstrem sebagai penyebab utama. Adapun keterangan warga (2 orang) cenderung memperkuat bantahan pemerintah dengan menyatakan “tidak ada penebangan liar” (edisi 16 Oktober, hal A4, alinea 6 dan 7: “Danau Jebol, Hancurkan Rumah Kami”)

Membaca seluruh berita *Koran Tempo*, pembaca mendapat kesan media ini sudah memperlakukan atau memberi ruang para pihak secara seimbang. Namun sesungguhnya yang disajikan *Koran Tempo* hanya membuat pembaca pada posisi harus memilih antara keterangan LSM dan keterangan pemerintah. Pembaca yang apriori terhadap pemerintah lebih cenderung menyetujui keterangan LSM. Sebaliknya, pembaca yang beranggapan bahwa LSM merupakan kelompok yang cenderung berseberangan dengan pemerintah akan menafikan keterangan LSM dan mengamini pemerintah.

Dalam situasi seperti itu, alih-alih mendapat informasi yang benar atau faktual, sesuai realitas di lapangan, pembaca justru menjadi bagian dari kontroversi. Yang paling sederhana adalah: pembaca bingung, apa sebenarnya penyebab banjir bandang Wasior. Pembaca pun tidak bisa menilai secara rasional sebab tak ada fakta pembandingan yang dihadirkan.

### Minus Pengamatan Jurnalis

Situasi yang dihadapi pembaca *Kompas* dan *Koran*

ilmu pengetahuan tentang jurnalistik, lebih mahir dalam keterampilan menulis khususnya penulisan berita, dan mengetahui tentang pengelolaan koran umum.

Setelah acara evaluasi, selanjutnya penyerahan sertifikat dan hadiah bagi peserta terbaik. Dari 15 peserta yang semula mengikuti pelatihan ini hanya empat peserta saja yang berhak mendapatkan sertifikat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LP3Y.

Untuk peserta terbaik diberikan oleh Slamet Riyadi Sabrawi kepada ketiga peserta yakni Emy Cayarani, Umi Narsih dan Tien Ratmanto.

### Rencana tindak lanjut

Peresmian penerbitan koran warga dengan nama “Krida”, adalah bentuk rencana tindak lanjut dari pelatihan pengelolaan koran warga. Krida akan terbit setiap akhir bulan. Edisi perdana, Krida akan terbit mulai November 2010. <sup>(may)</sup>

*Tempo* di atas tak akan terjadi apabila jurnalis kedua surat kabar ini menghadirkan fakta hasil pengamatannya untuk melengkapi beritanya sekaligus sebagai verifikasi atau pengujian atas semua keterangan para pihak.

Bill Kovack dan Tom Rosenstiel dalam Elemen-elemen Jurnalisme (2004) telah secara tegas mengingatkan bahwa salah satu elemen penting dalam kerja jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Pengujian atas fakta, apakah memang fakta itu benar adanya seperti didengar atau disampaikan narasumber/saksi.

Hasil pengamatan menunjukkan, langkah pengamatan lapangan tidak terlihat sama sekali. Tak ada satu kalimat pun dari 19 item berita yang menunjukkan ataupun sekadar mengisyaratkan bahwa jurnalis dari kedua media cetak ini berusaha membuktikan kebenaran dari keterangan para pihak ataupun tanpa bertujuan menguji keterangan narasumber melakukan pengamatan langsung. Artinya, jurnalis kedua media cetak ini menerima apa adanya (*taken for granted*) yang disampaikan narasumber lalu memberitakannya. Bahkan, untuk *Koran Tempo*, membenturkan kedua pihak.

Adanya verifikasi akan membantu publik mendapatkan fakta yang lebih tepat, minimal lebih mendekati realitas. Bukan menelan fakta yang dihasilkan oleh pihak-pihak untuk kepentingan mereka. Dengan bantuan adanya fakta hasil pengamatan jurnalis, publik akan bisa menilai situasi sesungguhnya tanpa harus mengamini dan memihak salah satu pihak hanya karena pihak tersebut pemerintah (sebagai yang punya kuasa) atau LSM.

Mengapa pengamatan lapangan tidak dilakukan? Pembaca tidak tahu. <sup>(Dedi H Purwadi)</sup>



# Pemuka Agama Harus Lebih Terbuka Soal HIV

**S**tigma negatif muncul karena sebagian orang lebih suka mengaitkan HIV/AIDS dengan aspek moral dibandingkan fakta ilmiah. Bahkan pemuka agama sekalipun masih banyak yang memandang kondom dan penularan HIV sebagai bagian dari perilaku seks bebas.

Pandangan ini mungkin masih relevan untuk 20 tahun lalu ketika penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV) paling sering terjadi melalui perilaku seks bebas dan pemakaian narkoba suntik. Tak heran jika ketika itu banyak yang mengatakan HIV/AIDS sebagai penyakit perilaku.

Namun untuk saat ini pola penyebaran virus ini telah berubah. Penularan melalui narkoba suntik banyak berkurang, sementara yang justru meningkat adalah penularan dari ibu hamil ke janin melalui plasenta dan dari suami ke istri atau sebaliknya melalui hubungan seks dengan pasangan resmi.

Bahkan cara-cara penularan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, kini mulai banyak terungkap. Misalnya melalui transfusi darah, tukar menukar alat cukur atau mesin tatto dan bahkan melalui kontak dengan darah ketika menolong korban kecelakaan.

Pengurus Komunitas Peduli AIDS Rumah Philia, Emmy Sahertian menilai fakta-fakta baru ini seringkali dikaburkan oleh sikap para tokoh dan pemuka agama yang selalu berpandangan negatif terhadap upaya penanggulangan HIV. Salah satunya dengan menentang penggunaan kondom.

Gereja Katolik misalnya, bertahun-tahun sejak pandemi AIDS menjadi perhatian dunia, selalu menolak kondom yang dianggap mengurangi nilai-nilai seks sebagai ekspresi cinta. Baru-baru ini saja Paus Benediktus XVI mengubah sikap tersebut, dengan memberikan toleransi penggunaan kondom khusus untuk mencegah penularan HIV.

Sementara di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, penolakan muncul dari sejumlah tokoh dan organisasi keagamaan ketika BKKBN berencana memasang ATM kondom di sejumlah tempat umum. Kondom ditolak karena dinilai justru akan memicu penyalahgunaan untuk seks bebas.

Akibatnya hingga tahun 2010 tingkat penggunaan kondom pada pasangan berisiko di Indonesia sangat rendah, baru sekitar 30 persen. Padahal salah satu indikator *Milenium Development Goals 6* (MDGs-6) merekomendasikan penggunaan kondom harus mencapai 65 persen pada 2014.

Emmy yang juga aktif berkarya di RS Cikini sejak tahun 1980-an untuk mendampingi pasien HIV/AIDS stadium terminal (sudah tidak mungkin diselamatkan) prihatin atas penolakan ini. Banyak orang yang tidak berdosa akhirnya ikut tertular gara-gara akses untuk mendapatkan kondom dibatasi oleh stigma negatif.

“Mungkin para ulama Kristen maupun Islam yang seperti ini terlalu banyak memikirkan surga sehingga lupa mendarat di bumi,” ungkap

Emmy dengan geram, saat ditemui di *Rumah Philia* yang berlokasi di Rawamangun, Jakarta Timur saat berbincang dengan *detikHealth*, Rabu (1/12/2010).

Tidak bisa dipungkiri, saat ini banyak kaum perempuan yang tertular HIV dari suaminya sendiri kemudian menularkannya pada anaknya saat hamil. Padahal ibu-ibu rumah tangga ini biasanya bukan pecandu narkoba suntik, setia pada pasangan dan tidak tahu-menahu soal HIV/AIDS.

Entah dari mana sang suami mendapatkan penyakit ini, istri berhak melindungi diri dari penularan virus dengan kondom saat berhubungan seks. Ketika ingin hamil, kondom bisa sesekali dilepas dengan memperhitungkan masa subur dan kenaikan CD4 (*cluster of differentiation 4*) yang menunjukkan tingkat kekebalan tubuh sang istri. (sumber: <http://www.detikhealth.com>)



Emmy Sahertian



# Menangkal Ulah Wartawan Tidak Profesional

Sampai saat ini masih sering ditemui berita di berbagai media pers tentang ulah orang yang mengaku wartawan, namun dalam prakteknya tidak bekerja sesuai standar teknik dan etika profesi kewartawanan. Artinya orang tersebut menggunakan topeng wartawan untuk pekerjaan lain dengan tujuan demi mendapatkan imbalan tertentu. Dia tidak mengutamakan memberi informasi yang diperlukan publik, namun menggunakan kedok sebagai pemungut informasi dan pemungut fakta di lapangan. Dari upayanya itulah sang wartawan gadungan itu berharap mendapatkan imbalan.

Penulis buku ini, yang notabene adalah seorang wartawan, memberikan catatan agar diketahui masyarakat luas tentang kiprah orang-orang yang berkedok sebagai wartawan, alias wartawan gadungan. Berdasarkan pengalamannya, sang penulis menyodorkan fakta tentang apa, siapa dan bagaimana sepak terjang orang-orang tersebut.

Dibagi dalam 13 bagian, mulai dari A hingga bagian M, buku ini mengetengahkan berbagai hal tentang kiprah orang-orang dengan sebutan, semisal “wartawan tanpa surat kabar” lebih dikenal dengan singkatan WTS, wartawan “muncul tanpa berita” dengan akronim wartawan “Muntaber”, atau “wartawan amplop” bahkan ada istilah lain yakni “wartawan bodrek”. Mungkin masyarakat sudah sering mendengar, atau mengetahui tentang istilah itu. Namun, belum lagi jelas tentang apa, siapa dan bagaimana mereka adanya.

Penulis juga menjelaskan tentang siapa sebenarnya wartawan yang sering disebut manusia “unik”, hingga bagaimana cara membedakan wartawan profesional dan wartawan palsu alias gadungan. Bahkan wartawan gadungan itu pun masih dipilah lagi dalam beberapa strata. Ada wartawan nakal di lapangan, di level redaksi *newsroom* dan oknum wartawan di level pimpinan, tentu

yang dimaksud di sini adalah pimpinan media massa (hal 53). Selain itu, ditampilkan pula contoh berita tentang ulah wartawan nakal (hal 61). Antara lain bagaimana aksi wartawan gadungan di Yogya yang melakukan perlawanan atas serangan kelompok wartawan asli. (hal 64)

Pertanyaan mendasar adalah, mengabdikan kepada siapakah sebenarnya wartawan profesional itu? Apakah untuk pemilik perusahaan media tempat dia bekerja? Untuk kepentingan

narasumber? Atau untuk dirinya sendiri? Pertanyaan pokok seperti itu sering terlewatkan manakala khalayak luas berhubungan, dihubungi atau tak disengaja bersentuhan karena keterlibatan dalam sebuah peristiwa, dengan makhluk yang disebut sebagai wartawan.

Mengacu pada sembilan elemen jurnalisme-nya Bill Kovach & Tom Rosentiel dalam buku *The Elements of Journalism*, praktek wartawan gadungan sangat jauh menyimpang dari ideal. Sebab, menurut Kovach, salah satu tugas pokok jurnalis adalah yang pertama-tama harus loyal pada warga, mengabdikan pada khalayak. Bukan pada profesi, apalagi pada pemilik perusahaan. Dengan demikian, tugas pokok wartawan profesional adalah memberi apa yang seharusnya diketahui dan dibutuhkan khalayak.

Bagaimana pun buku ini memberi pemahaman baru kepada khalayak dalam upaya mengatasi, menangkal dan sekaligus melawan sepak terjang wartawan gadungan yang tentu saja merugikan itu. Terlepas dari itu semua, dalam buku yang dilampiri teks undang-undang tentang pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia ini, memerlukan penyempurnaan terkhusus dalam editing, karena masih banyak penulisan kata tidak akurat. Kata *improvisasi* (hal 55), *bargainning* (118) dan *aktifitas* (hal 122), untuk menyebut contoh, masih dijumpai pada buku ini. <sup>(awd)</sup>

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Judul</b>    | <b>: Jurus Ampuh Mengatasi Oknum Wartawan Nakal (Strategi Jitu untuk Pejabat dan Pengusaha)</b> |
| <b>Penulis</b>  | <b>: Drs.H Muhammad Zen</b>   |
| <b>Penerbit</b> | <b>: Cakrawala Media Publisher</b>  |
| <b>Tahun</b>    | <b>: 2010</b>   |
| <b>Tebal</b>    | <b>: xii + 197</b>  |

# Pak Guru, Telanjur Mencintai LSM

Foto : Dedi/ LP3Y



**SOSOKNYA** mudah dikenali di lingkungan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM). Lelaki ini bertubuh besar, tapi belum cukup untuk bisa disebut gemuk, rambutnya lurus tebal, berkulit hitam dan mengenakan kacamata minus.

Gerakannya lincah, cara berjalan cenderung cepat, gaya bicara lentur, bahasa tutur yang diucapkan kadang muncul dengan pilihan kosa kata khas pekerja sosial.

Dialah Hernindya Wisnuadji, atau lebih akrab dipanggil dengan nama Adji. Pria lajang kelahiran Yogyakarta 35 tahun lalu itu, semula tidak pernah membayangkan akan menerjuni dunia LSM, kemudian aktif di dalamnya sebagai pilihan untuk mengaktualisasikan dirinya. Lulus SMA awal 90-an, Adji kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Dia masuk ke jurusan Fakultas Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma. Waktu itu pas peralihan dari IKIP menjadi universitas, jadi saya senang, sebab memang saya tidak bercita-cita untuk menjadi guru, ujar Adji, ketika ditemui di kantor LP3Y beberapa waktu lalu. Saat menjadi mahasiswa itulah, Adji mengenal aktivitas bergaul dengan masyarakat.

Dia menjadi anggota lembaga pengabdian masyarakat hingga tahun 2000. Tugasnya adalah tim pengelolaan kuliah kerja nyata (KKN), antara lain bertugas pada *emergency respons* bersama *Catholic Relief Service* (CRS), membagikan bantuan beras gratis dari Amerika Serikat, untuk DIY, di wilayah Gunungkidul dan Sleman. Aktivitas itu telah memberi pengalaman berharga bagi Adji, antara lain bagaimana menjalin kerjasama dengan lembaga donor, bagaimana membangun jaringan di desa-desa di berbagai kabupaten di DIY. Kegiatan yang dilakukan hingga tahun 2006 itu, telah membawa Adji kemudian membentuk *Yayasan Lintas Interfaith* sebagai pendiri sekaligus pengurusnya. Sampai sekarang ia masih aktif sebagai anggota.

diyayanan tersebut, Adji bertugas sebagai *peace building* dalam kurun 2002-2006. Sejak 2007 Adji aktif di Institute for Development and Economic Analysis (IDEA)

Saat ini jabatannya di IDEA adalah koordinator divisi perencanaan dan penganggaran partisipatif transparan dan akuntabel. Demikianlah, aktivitas di LSM telah menjadi pilihan hidup bagi Adji. Bisa mewujudkan gagasan saya, terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat, ujar dia.

Bagi Adji, bagaimana menautkan keprihatinan sosial dengan kebutuhan masyarakat, setelah dianalisa salah satu caranya harus ada pihak ketiga, atau lembaga donor. Disanalah dia merasa harus berperan. Artinya di sana akan terjadi relasi antara warga dan lembaga donor. Dan menurut Adji, hal itu akan terlaksana dengan dijembatani oleh kehadiran LSM.

Selama aktif sebagai pekerja sosial, dihitung sejak 1998, menurut Adji, sejauh ini berjalan mulus dan menyenangkan. Bagi anak kedua dari empat bersaudara, lahir dari pasangan Bambang Murcipto (58) dan Sukartina (58) ini, ketulusan, keikhlasan dan keseriusan melihat persoalan masyarakat, merupakan hal yang mutlak dikuasai dan dikerjakan oleh pegiat LSM.

Pengalaman lain yang menarik adalah, ketika di Gunungkidul, dirinya berhasil membangun desa kawasan konservasi, Semoyo, kecamatan Pathuk. Di sana ia membuat model desa yang saat itu mempunyai kasus konflik pilihan lurah, lalu dengan upaya *peace building* tadi, Adji dan Yayasan Lintas Interfaith, berhasil memberdayakan warga, yang kemudian dicanangkan sebagai desa konservasi. Pada saat aktif di Gunungkidul itu pula Adji kemudian terlibat dalam pembentukan radio komunitas (Rakom) Desa Kusuma, sebagai koordinator pemberitaan. Tak pelak, penguasaan saya tentang musik juga jadi terasah ketika mengelola rakom itu, tambah Adji.

Pria asli kelahiran Kampung Gondolayu, Yogyakarta ini punya hobi musik, hampir dari semua aliran. Dalam jejaring LP3Y-Ford Foundation untuk pemulihan warga pasca gempa di Bantul, bersama IDEA dan ASSPUK, Adji sebagai wakil dari IDEA selalu aktif mengikuti dan menjalankan setiap program yang telah dicanangkan. Seolah tak pernah habis, energinya dicurahkan untuk terus bergiat di dunia sosial, memberdayakan masyarakat melalui LSM.<sup>(awd)</sup>